

COMMUNITY BASED TOURISM: PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN WISATA HALAL DI KABUPATEN ACEH BARAT

Desi Maulida^{1)*}, Cut Nabilla Kesha²⁾, Safrida³⁾

^{1,3}Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Aceh-Indonesia

²Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Aceh-Indonesia

*Corresponding Author: desimaulida@utu.ac.id

ABSTRACT

Tourism development certainly cannot be separated from the role of the community as development agents who in principle have the same authority and responsibility as the government in managing tourism. This concept is known as community-based tourism, namely tourism management that promotes active participation from the community. This research aims to examine development efforts carried out by the community as a form of participation in the development of halal tourism in West Aceh Regency and analyze the obstacles faced in tourism management. This research is descriptive qualitative research. There were 9 research informants from three sub-districts, namely Samatiga, Johan Pahlawan and Pantou Reu sub-districts. Data collection was carried out by means of interviews, observation and documentation studies. The theory used in this research is the convergence model of communication with seven indicators, namely information, uncertainty, convergence, respect, mutual agreement, collective action, and network of relationships. The results of the study show that community participation in tourism development efforts in West Aceh district is still relatively minimal. This is because some people still think that tourism management is still the full responsibility of the government. The obstacles identified in the implementation of tourism development include the belief that tourism management is still the government's responsibility, the assumption that tourism practices can violate the rules of Islamic law, and the lack of community competence in tourism management so that special training is needed to be provided to the community by government.

Keywords: Community Based Tourism, Community Participation, Tourism Development

ABSTRAK

Pengembangan pariwisata tentu tidak bisa terlepas dari peran serta masyarakat sebagai agen pembangunan yang pada prinsipnya memiliki wewenang dan tanggung jawab yang sama dengan pemerintah dalam pengelolaan pariwisata. Konsep ini dikenal dengan istilah community-based tourism, yaitu pengelolaan pariwisata yang mengedepankan partisipasi aktif dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengkaji upaya pengembangan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk partisipatif dalam pengembangan wisata halal di Kabupaten Aceh Barat serta menganalisis kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pariwisata. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Informan penelitian berjumlah 9 orang dari tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Samatiga, Johan Pahlawan dan Pantou Reu. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah convergence model of communication dengan tujuh indikator, yaitu information, uncertainty, convergence, respect, mutual agreement, collective action, dan network of relationship. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan wisata di Kabupaten Aceh Barat masih tergolong minim. Hal itu dikarenakan Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa pengelolaan wisata masih menjadi tanggungjawab pemerintah sepenuhnya. Adapun kendala yang diidentifikasi dalam pelaksanaan pengembangan wisata diantaranya masih adanya anggapan bahwa pengelolaan wisata sepenuhnya masih menjadi tanggungjawab pemerintah, adanya anggapan bahwa praktik wisata dapat mencederai aturan syariat Islam, dan minimnya kompetensi masyarakat dalam pengelolaan wisata sehingga diperlukan pelatihan-pelatihan khusus yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah.

Kata Kunci: Community Based Tourism, Partisipasi Masyarakat, Pengembangan Wisata

PENDAHULUAN

Aceh Barat merupakan salah satu kabupaten di Aceh dengan jumlah penduduk muslim mencapai 195.406 jiwa atau lebih dari 90% populasi (Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, 2020). Berdasarkan potensi sekaligus peluang tingginya masyarakat muslim di Aceh Barat, tentunya sangat mendukung pengembangan destinasi wisata halal. Sebagai bentuk dalam mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan pariwisata, melalui Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata, dalam pasal 8 dijelaskan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya berperan aktif dalam penyelenggaraan pariwisata (Qanun Aceh Nomor 08 Tahun 2013). Peran serta masyarakat dapat berupa pemberian saran, tanggapan, masukan terhadap pengembangan pariwisata, serta berperan aktif dalam pengelolaan pariwisata serta melakukan pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan. Berdasarkan observasi awal peneliti, saat ini pemerintah kabupaten aceh barat di bawah dinas pariwisata pemuda dan olahraga masih menjadi satu-satunya implementator dalam pelaksanaan pariwisata. Rendahnya keterlibatan masyarakat menjadikan tujuan pariwisata menjadi tidak dapat dicapai secara optimal (Dolezal C., & Marina Novelli, 2020). Pengelolaan pariwisata masih bersifat *top-down* yang inisiasi penyelenggaraan pariwisata masih berasal dari pemerintah, dan masyarakat hanya menjadi objek. Padahal, partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam upaya pengembangan wisata yang berkelanjutan yang diwujudkan melalui konsep *community-based tourism*, yakni pariwisata berbasis masyarakat (Karacaoglu S., & Birdir K., 2017). Artinya, masyarakat tidak lagi menjadi objek atau target dari sebuah program namun dapat menjadi actor atau inisiator dalam pengelolaan pariwisata. Terlebih, saat ini kabupaten aceh barat memiliki beragam potensi wisata yang dapat dikembangkan dan menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat setempat yang didapatkan dari belanja wisatawan. Adapun potensi wisata di Aceh Barat dapat dilihat pada tabel 1 di bawah:

Tabel 1. Daftar Destinasi Wisata di Kabupaten Aceh Barat

No	Nama Destinasi wisata	Kecamatan/Lokasi
1	Tugu Kupiah Teuku Umar	Johan Pahlawan
2	Persawahan Suak Sigadeng	Johan Pahlawan
3	Pantai Ujong Karang	Johan Pahlawan
4	Pantai Lhok Geudong	Johan Pahlawan
5	Pantai Suak Ribee	Johan Pahlawan
6	Pantai Lhok Bubon	Samatiga

7	Danau Geunang Gedong	Kaway XVI
8	Lebok Pineu	Sungai Mas
9	Krung Tutut	Sungai Mas
10	Pantai Lanaga	Meureubo
11	Makam Teuku Umar	Panton Reu
12	Pulau Gosong	Panton Reu

Sumber: Alib, M (2021)

Berdasarkan tabel di atas, Aceh Barat memiliki potensi yang sangat banyak dan beragam untuk dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata pilihan wisatawan dengan berbagai karakteristik dan diferensiasi yang dimiliki. Namun, saat ini pengelolaan pariwisata tersebut masih bertumpu pada sistem pelaksanaan yang berorientasi pada pemerintah. Rendahnya pengawasan dan keterlibatan masyarakat menjadikan potensi wisata tersebut tidak berkembang dengan baik, hal itu ditandai dengan minimnya akses informasi, kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia seperti mushalla untuk mewujudkan konsep wisata halal, pengelolaan dan akses jalan yang belum memadai, pembenahan tempat wisata untuk menjadikan destinasi tersebut menjadi unggul masih belum dapat diimplementasikan

Dari gambar di atas, terlihat bahwa Kabupaten Aceh Barat memiliki produk wisata yang sangat potensial, namun dalam pengelolaan fasilitas masih belum berjalan dengan baik. Sebagian besar masyarakat masih memiliki anggapan bahwa pengelolaan wisata menjadi tupoksi dan kewenangan dari pemerintah yang dijalankan bedarkan kebijakan yang dibuat untuk

diimplementasikan, mereka hanya berperan sebagai target program bukan inisiator atau bagian dari tim pelaksana. Selanjutnya, ditemukan juga adanya anggapan bahwa praktik pariwisata tidak akan memberikan manfaat kepada masyarakat sehingga keterlibatan masyarakat bukan menjadi hal prioritas yang harus dilakukan. Padahal, partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan pariwisata menjadi nilai jual yang berorientasi pada profit jika dikemas dengan serius dan melengkapi indikator-indikator konsep wisata halal termasuk di dalamnya amenities, atraksi maupun aksesibilitas.

State of the Art penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan tentang wisata halal di Indonesia, namun masih sedikit yang berfokus pada partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata halal. Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada upaya pemerintah sebagai implementator dalam upaya pengembangan wisata. Masyarakat hanya dijadikan sebagai objek pengembangan wisata. Padahal, dalam beberapa konsep dan indikator pengembangan wisata halal menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi kunci sukses dalam pengembangan wisata halal. Selain itu, peneliti lain juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat dapat meningkatkan keberhasilan program wisata (Pantiyasa, 2018). Lebih dari itu, masyarakat harus mengembangkan kapasitas untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan berkontribusi dalam penyelenggaraan wisata secara umum (Tolkach D, King B, 2015). Penelitian ini memfokuskan pada partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata halal di Aceh Barat, khususnya dalam konteks *Community Based Tourism* (CBT). Urgensi penelitian ini mengedepankan pada implementasi konsep baru dalam dunia pariwisata yaitu *community-based tourism* yang pengembangannya berasal dari masyarakat atau bersifat bottom-up. Penelitian ini menjadi penting sebagai kritik atas pengelolaan wisata saat ini yang penyelenggaraannya hanya berasal dari pemerintah tanpa keterlibatan masyarakat dan bersifat top-down, dimana masyarakat hanya menjadi objek atau target sasaran sebuah program. Kebaruan yang dihasilkan dari penelitian ini nantinya akan memberikan pemahaman lebih dalam tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata halal di Aceh Barat, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi, serta strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata halal di Aceh Barat. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan kontribusi pada pengembangan teori tentang CBT dan wisata halal, serta memberikan masukan bagi pemerintah dan pelaku industri pariwisata dalam mengembangkan wisata halal di Aceh Barat dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat sehingga masyarakat dapat berperan sebagai inisiator dalam program pengembangan wisata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian ini ialah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Penentuan informan menggunakan metode *purposive* yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu (Creswell, J. W., 2010). Informan dalam penelitian ini berasal dari perwakilan masyarakat dari tiga kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, yaitu Kecamatan Johan Pahlawan, Samatiga dan Pantou Reu. Adapun informan tambahan berasal dari aparat desa, pemerintah dan pelaku usaha, penetapan informan tambahan bertujuan untuk mengkonfirmasi data yang telah didapatkan dari informan kunci sebagai bentuk verifikasi kevalidan dari sebuah data. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang berasal dari tiga kecamatan yang menjadi fokus lokasi penelitian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Data Informan Penelitian

No	Informan	Keterangan
1	Informan 1	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Aceh Barat
2	Informan 2	Kepala Bidang Pariwisata Disparpora Aceh Barat
3	Informan 3	Aparatur Desa di Kecamatan Pantou Reu
4	Informan 4	Masyarakat di Kecamatan Samatiga
5	Informan 5	Masyarakat di Kecamatan Johan Pahlawan
6	Informan 6	Pelaku Usaha di Kecamatan Samatiga
7	Informan 7	Masyarakat di Kecamatan Pantou Reu
8	Informan 8	Aparatur Desa di Kecamatan Johan Pahlawan
9	Informan 9	Aparatur Desa di Kecamatan Samatiga

Analisis data dilakukan dengan empat tahapan, yaitu koleksi data (mengumpulkan data), reduksi data (dirangkum dan dipisahkan menurut fokus yang telah ditetapkan berupa informasi yang sesuai), penyajian data (menyajikan data sesuai dengan fokus penelitian), dan verifikasi (penarikan kesimpulan). Penelitian ini berlangsung selama satu tahun yang dimulai dengan identifikasi masalah berdasarkan observasi, analisis masalah, pengembangan ide dan solusi menggunakan konsep yang digunakan yaitu *community-based tourism*, implementasi solusi yang ditawarkan dan evaluasi untuk mengukur tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengembangan wisata berbasis halal tourism di Kabupaten Aceh Barat menggunakan model konvergensi komunikasi (*convergence model of communication*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Community Based Tourism dalam Upaya Pengembangan Wisata Berbasis Halal

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata di Kabupaten Aceh Barat dikaji dengan menggunakan pendekatan Community Based Tourism yang dikemukakan oleh Murphy (1985) yang dikaji berdasarkan beberapa faktor, diantaranya ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan politik.

1. Faktor Ekonomi

Kesenjangan dan peningkatan ekonomi masyarakat menjadi fokus utama dalam indikator ini. Sehingga dengan penerapan CBT dapat meningkatkan sistem perekonomian masyarakat yang didapatkan dari hasil belanja wisatawan. Dalam wawancaranya, Informan 1 selaku Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Aceh Barat, menyampaikan bahwa:

“Kita memang membutuhkan peran dari semua pihak, tidak mungkin kita bekerja sendiri. Apalagi praktik wisata ini secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Sudah ada beberapa upaya yang kita lakukan untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengembangan wisata, diantaranya dengan melakukan sosialisasi, kita juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada kelompok sadar wisata sebagai perpanjangan tangan kita dalam menyampaikan informasi-informasi seputaran wisata kepada masyarakat yang ada di desa masing-masing. Jadi harapannya, masyarakat akan terbantu ekonominya dari hasil belanja wisatawan, namun kita juga harus serius dalam penyediaan tempat wisata atau produk-produk wisata yang layak dan menarik minat wisatawan untuk memberi atau menikmati fasilitas yang disediakan”. (Informan 1, Kecamatan Johan Pahlawan, 24/07/2023).

Dapat pernyataan di atas dapat dipahami bahwa, praktik wisata yang dikembangkan dengan serius dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada di kawasan wisata. Hal itu diperoleh dari dana yang dikeluarkan oleh wisatawan untuk membeli produk berbentuk barang maupun jasa yang ditawarkan di tempat wisata. Namun, hal itu terkadang tidak disadari oleh mayoritas masyarakat yang menganggap

bahwa pelaksanaan pariwisata tidak akan memberikan dampak secara langsung dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, bahkan akan mencemari lingkungan karena masih terdapatnya wisatawan-wisatawan yang membuang sampah sembarangan dan tidak menjaga dengan baik fasilitas-fasilitas yang disediakan. Seperti yang disampaikan oleh Informan 4 yang merupakan salah satu masyarakat di kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat menyampaikan bahwa:

“Kita bukan tidak mau terlibat dalam pengelolaan wisata, tapi kadang kita terkendala dengan modal untuk mendirikan usaha misalnya café, penyewaan sarana wisata di pantai seperti ban pelampung, dan lain-lain. jadi tidak banyak yang bisa kita lakukan disini, paling mereka yang punya uang bisa mendirikan warung atau tempat makan, kita hanya jadi penonton saja. Belum lagi, banyak wisatawan yang masih suka buang sampah sembarangan, sehingga bukan malah untung bahkan buntung. Kawasan kita menjadi kotor selepas mereka pulang”. (Informan 4, Kecamatan Samatiga, 14/08/2023).

Hal yang senada juga disampaikan oleh Informan 5 yang merupakan salah satu masyarakat di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dalam wawancara secara terpisah menyampaikan bahwa:

“sebenarnya kita mau aja jika melibatkan diri untuk membangun wisata di daerah kita. Apalagi kita tau kalau wisata itu kan bisa meningkatkan ekonomi kita. Tapi balik lagi, harusnya pemerintah memberikan bantuan dana untuk kita mendirikan usaha. Untuk sehari-hari aja masih susah apalagi kalau untuk buat usaha di tempat wisata, disamping itu kita lihat juga peran pemerintah untuk mengajak kita terlibat masih sangat kurang jadi untuk apa capek-capek”. (Informan 5, Kecamatan Johan Pahlawan, 09/08/2023).

Dari dua pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa rendahnya keterlibatan masyarakat didasari pada tidak berdayanya ekonomi dalam membangun usaha di kawasan wisata, adanya anggapan bahwa praktik wisata juga tidak memberikan efek signifikan kepada masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, serta belum optimalnya peran pemerintah dalam mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan wisata.

2. Faktor Sosial

Keadaan sosial juga ikut mempengaruhi dalam penerapan CBT, hal itu dikarenakan interaksi yang baik akan menjadikan sebuah proses pengembangan bergerak ke arah yang lebih baik pula (Edi Suharto, 2014). Interaksi antar stakeholder menjadi hal penting yang harus dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran agar bersama-sama memajukan pariwisata. Terlebih Aceh saat ini dikenal sebagai daerah syariat islam, sehingga pelaksanaan pada setiap sektor harus berbasis pada aturan syariat. Pariwisata yang dikemas dalam konteks wisata syariah atau yang lebih dikenal sebagai wisata halal memberikan tantangan tersendiri pada pemerintah, masyarakat, pelaku usaha maupun wisatawan (Noviantoro K M., & Zuhrohman A. P, 2020). Menyikapi hal ini, Informan 3

yang merupakan aparaturnya gampong (desa) di salah satu desa di Kecamatan Pantou Reu dalam wawancaranya menyampaikan bahwa:

“Harus kita akui bahwa kita adalah daerah syariat islam, itu tentu menjadi tantangan bagi kita untuk mengembangkan pariwisata, terlebih yang orang pahami kalau wisata itu kan selalu identic dengan kebebasan, sedangkan daerah kita tidak bisa sepenuhnya begitu. Bahkan sebagian masyarakat disini seperti menolak setiap kedatangan wisatawan-wisatawan luar yang dicurigai akan melanggar syariat, misalnya mabuk-mabukan, berdua-duaan dengan yang bukan muhrimnya, atau hal-hal lain yang tidak sesuai dengan aturan kita di desa. Oleh sebab itu, kita sulit untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun wisata. Mungkin saja para wisatawan tidak nyaman ketika berada di kawasan kita karena bisa saja tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari msayarakat karena kecurigaan-kecurigaan tadi, jadi memang diperlukan peran dari pemerintah atau pihak lain untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat serta bisa membuat aturan yang jelas dalam berwisata di Kabupaten Aceh Barat ini”. (Informan 3, Kecamatan Pantou Reu , 02/082023).

Penyataan yang sama juga disampaikan oleh Informan 2 yaitu Kepala Bidang Pariwisata Disarpورا Kabupaten Aceh Barat dalam wawancaranya menyampaikan:

“Sebenarnya memang bukan hal yang mudah dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat kita untuk berpartisipasi dalam pengembangan wisata. Sikap apatisme masyarakat terhadap pelaksanaan wisata dikarenakan masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa praktik wisata ini akan mencederai syariat islam. Pemikiran-pemikiran yang seperti itu menjadikan masyarakat enggan menjadi bagian dari kita, sehingga yang terjadi kawasan wisata tidak dikembangkan dan wisatawan juga tidak mendapatkan kenyamanan saat berwisata. Terkait dengan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh wisatawan kan harusnya bisa disampaikan, misalnya dengan menempelkan tulisan di setiap sisi tempat wisata, apa-apa yang dilarang, dan tentu kita awasi secara bersama-sama”. (Informan 2, Kecamatan Johan Pahlawan, 26/072023).

Dari pernyataan di atas, dipahami bahwa lingkungan sosial menjadi salah satu penghambat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam memajukan pariwisata di daerahnya masing-masing. Apatisme masyarakat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya, masih terdapatnya anggapan bahwa pelaksanaan wisata akan mencederai aturan syariat, keterbatasan pemerintah dalam hal pengawasan, serta masih belum adanta regulasi secara spesifik di setiap kecamatan dalam implementasi wisata halal untuk setiap desa.

3. Faktor Budaya

Nilai-nilai budaya dalam kelompok masyarakat juga kerap kali menjadi tolak ukur dalam penerapan CBT ini. Hal itu dikarenakan masih adanya aturan budaya yang membolehkan atau melarang dalam hal-hal tertentu dari sebuah praktik wisata (Chookaew S., & Charatarawat J., 2015). Wisata kerap kali diidentifikasi sebagai kegiatan bersenang-senang tanpa ada aturan yang mengikat. Budaya di Aceh khususnya Aceh Barat juga menjadi pertimbangan kurang

optimalnya pengelolaan wisata, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Sebagai daerah syariat islam Aceh Barat memiliki aturan-aturan yang tidak tertulis dalam sebuah regulasi dalam pelaksanaan wisata, seperti terbatasnya jam berkunjung ke tempat wisata-wisata tertentu, misalnya menjelang sholat magrib wisatawan sudah diharuskan pulang dan meninggalkan tempat wisata, banyak dari tempat-tempat wisata yang tidak boleh dibuka ketika malam hari. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Informan 6 yaitu salah satu pelaku usaha di Kecamatan samatiga, dalam wawancara ia menyampaikan:

“Kita memang tidak bisa bergerak bebas seperti daerah-daerah lain di luar Aceh. Biasanya kita jam 6 itu sudah tutup, tidak boleh buka, karena kalau kedatangan saat patroli Wilayatul Hisbah (WH), bisa kena kita. Nah, terkadang wisatawan baru memesan makanan jam setengah 6, kita siapkan makanannya kan membutuhkan waktu juga, belum lagi dia makan. Dan itu tentu menjadi tantangan bagi kita, karena memang wisatawan disini yang ramainya pas waktu sore. Malamnya memang tidak boleh buka, sekalipun kita janjikan bahwa kita akan mengontrol sendiri wisatawannya, dan kita jamin tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tapi tetap saja tidak dibolehkan. Jadi memang tidak ada solusi akan hal itu. Semangat kita juga jadi kurang, apalagi kita diminta untuk bantu secara bersama-sama memajukan pariwisata. Harusnya pemerintah memberikan solusi terbaik terkait hal ini, jadi biar kita juga lebih semangat”. (Informan 6, Kecamatan Samatiga, 12/082023).

Beda halnya dengan pernyataan diatas, Informan 7 yang merupakan salah satu masyarakat di desa Kecamatan Pantan Reu saat diwawancara menyampaikan bahwa:

“Alhamdulillah kita punya budaya yang memfokuskan pada aturan syariat islam, dan itu kan udah menjadi sebuah kebiasaan kita untuk menjaga itu. Dalam hal pariwisata, itu juga harus kita terapkan, tidak boleh tidak. Jangan sampai orang berwisata melanggar aturan budaya di daerah kita, dan tentu itu menjadi kewajiban untuk sama-sama kita jaga. Contoh misalnya hari jumat, itu sebisanya kita mengurangi kegiatan yang sifatnya bersenang-senang atau duniawi, tapi harus lebih memfokuskan pada kegiatan keagamaan, sehingga banyak pantai-pantai yang tidak mengizinkan wisatawan berkunjung di hari jumat” (Informan 7, Kecamatan Pantan Reu, 02/082023).

Hal serupa juga disampaikan oleh Informan 4 yang merupakan masyarakat di salah satu desa di Kecamatan Samatiga, ia mengemukakan bahwa:

“Kita memang punya keterbatasan dalam mengembangkan wisata di daerah kita masing-masing. Ada aturan-aturan syariat serta aturan yang sudah menjadi budaya di daerah kita. Kalau kita melihat jumlah kunjungan wisatawan memang banyaknya itu di hari libur atau lebaran, biasanya dimulai dari lebaran kedua sampai lebaran kelima, baik idul fitri maupun idul adha. Meskipun itu hal yang menjanjikan, tapi kita tetap membatasi jadwal kunjungan wisatawan dengan memperhatikan waktu-waktu tertentu, misalnya lebaran kedua idul fitri kita menutup pantai dari kunjungan wisatawan, dan itu sudah kita terapkan” (Informan 4, Kecamatan Samatiga, 14/082023).

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa adanya aturan budaya menjadikan masyarakat memiliki keterbatasan dalam pengembangan wisata di Kabupaten Aceh Barat. Adanya aturan budaya yang diadopsi oleh masyarakat yang bertempat tinggal di seputaran kawasan wisata menjadi hal yang harus dipertimbangkan dan menjadi kearifan local yang harus difokuskan dalam pelaksanaan sosial masyarakat, termasuk dalam praktik wisata. Masih adanya pemikiran bahwa praktik wisata yang tidak dikendalikan akan mencederai pelaksanaan syariat islam maupun budaya lokal di kawasan tempat wisata.

4. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor dalam pelaksanaan praktik wisata berbasis masyarakat. Lingkungan yang mendukung akan berdampak pada semangat dan tingginya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan wisata (Hermawati, 2020). Lingkungan dapat dipahami sebagai aspek penunjang yang tersedia pada kawasan wisata yang dapat memberikan keamanan dan kenyamanan kepada wisatawan (Istiyani, 2019). Masyarakat dapat melibatkan dirinya sebagai penggerak dalam mengembangkan, melestarikan serta menjaga potensi wisata yang tersedia. Hal itu dapat dilakukan dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung, seperti tempat ibadah, MCK, menjaga kebersihan destinasi, akses jalan yang dapat dilalui oleh wisatawan serta melakukan pengawasan pada destinasi untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dapat merugikan masyarakat maupun wisatawan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Informan 5 dalam wawancara menyampaikan bahwa:

“Sebenarnya ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga dan memastikan lingkungan tempat wisata itu menjadi layak untuk dikunjungi dan aman. Tapi ya itu, kadang kita terkendala dengan sumber daya manusianya. Kadang ada yang mau membantu, tapi kan gak mungkin gak dibayar, walaupun kita bayar, anggaran kita dari mana. Harusnya memang dari pemerintah menyediakan anggaran untuk pengelolaan lingkungan tempat wisata, sehingga masyarakat menjadi lebih semangat dalam melestarikan lingkungan sekitar tempat wisata”. (Informan 5, Kecamatan Johan Pahlawan, 09/082023).

Dalam kesempatan yang berbeda, Informan 2 yang merupakan Kepala Bidang Pariwisata Disparpora Aceh Barat juga menyampaikan hal yang senada terkait dengan pengelolaan lingkungan yang menjadi salah satu faktor pendukung kesiapan dari tempat wisata untuk selanjutnya bisa menjadi pilihan calon wisatawan. Dalam wawancara, ia menyampaikan:

“Harus kita akui, memang sampai hari ini kita sedikit sulit dalam pengelolaan lingkungan tempat wisata, tidak ada masyarakat yang mau secara sukarela menjaga lingkungan, dan itu kita paham, karena kita memang tidak punya banyak anggaran untuk hal itu, sehingga semangat masyarakat sekitar sedikit berkurang. Belum lagi rendahnya kesadaran wisatawan dalam mengelola sampah dengan baik, sehingga banyak tempat wisata yang tidak bersih dan itu tentu membuat wisatawan menjadi tidak nyaman. Namun, kita sedang

mengupayakan itu. Kita akan melakukan pendekatan-pendekatan dengan masyarakat sekitar tempat wisata untuk bersama-sama menjaga alam, menjaga kebersihan, termasuk menjaga fasilitas-fasilitas yang sudah kita bangun. Kalau semua itu dijaga dengan baik pasti wisatawan semakin banyak, dan masyarakat juga akan terbantu dari belanja-belanja wisatawan di tempat wisata". (Informan 2, Kecamatan Johan Pahlawan, 26/07/2023).

Lebih lanjut, informan 8 yang merupakan aparatur desa di Kecamatan Johan Pahlawan menyampaikan bahwa:

"Kita memang harus memperhatikan kesiapan segala hal ketika menyambut wisatawan, termasuk lingkungan. Lingkungan fisik tentunya menjadi hal penting yang harus kita perhatikan, seperti kebersihan dari tempat wisata, ketersediaan kamar mandi, tempat sholat, kemudian cuaca yang terkadang hujan, angin, itu juga harusnya bisa kita berikan solusi. Misalnya kalau wisata pantai, adanya tempat-tempat yang bisa dijadikan sebagai tempat berteduh, jadi tidak hujan-hujan. Tapi kita belum sampai kesitu, karena kita tidak punya biaya untuk membangun dan menyediakan itu. Harapannya dari pemerintah bisa memfasilitasi itu, jadi kita kerjasama dengan pemerintah". (Informan 8, Kecamatan Johan Pahlawan, 07/08/2023).

5. Faktor Politik

Faktor politik dalam konteks pariwisata berhubungan dengan kebijakan dan pengambilan keputusan pengelolaan wisata (Colin, 2000). Secara politis masyarakat dapat mengambil peran sebagai pengambil keputusan, artinya masyarakat tidak hanya menjadi target namun dapat menjadi inisiator dari sebuah program pengembangan bersama pemerintah dan stakeholder lainnya.

Community based tourism dipahami sebagai partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata menjadikan masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek terkait kebijakan dan keputusan pengelolaan wisata yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya, masyarakat memiliki peran yang sama dalam mempengaruhi atau bahkan menjadi inisator dalam program pengembangan wisata, termasuk yang sedang diupayakan oleh pemerintah kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Jika merujuk pada Qanun Aceh Nomor 08 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan dinyatakan bahwa kelompok masyarakat pariwisata berperan serta dalam memberikan saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan dan masukan terhadap arah kebijakan pengembangan pariwisata Aceh. Menyikapi hal ini, informan 1 Kadisparpora Kabupaten Aceh Barat dalam wawancara menyampaikan bahwa:

"Dalam qanun wisata Aceh sudah jelas disampaikan bahwa masyarakat memiliki andil dalam pelaksanaan wisata di setiap kabupaten atau kota. Begitu juga dengan yang sedang kita upayakan di kabupaten aceh barat, kita mencoba melakukan pendekatan dengan masyarakat yang diwakili oleh kelompok sadar wisata untuk terlibat aktif dalam pengembangan wisata, masyarakat harusnya bisa menjadi partner kita dalam bekerja apalagi masyarakat yang menjadi fokus pengembangan kita seperti di kecamatan Samatiga dan Johan Pahlawan. Tapi sampai hari ini kita belum mencapai itu, masyarakat sedikit

sulit untuk diajak, kebanyakan dari mereka menganggap bahwa ini kerjanya pemerintah terutama dinas pariwisata karena pemerintah kan dibayar dari gaji, padahal kan konsepnya tidak begitu. Kalau wisata itu maju, otomatis yang merasakan untungnya juga masyarakat setempat, misalnya dari jualan-jualan yang akan dibeli oleh wisatawan akan membantu dalam perekonomian masyarakat juga nantinya”. (Informan 1, Kecamatan Johan Pahlawan, 24/07/2023).

Menyikapi hal ini, informan 9 yang merupakan salah satu aparatur desa di Kecamatan Samatiga juga menyampaikan bahwa itu menjadi tanggungjawab pemerintah sepenuhnya, dalam wawancara ia sampaikan:

“Kadang kita bingung juga, kita ingin terlibat tapi kita gak tau apa yang harus kita lakukan. Harusnya pemerintah sering-sering memberikan informasi baik dari sosialisasi maupun pelatihan-pelatihan sehingga kita akan paham. Karena memang harus saya akui, kebanyakan dari kita menganggap bahwa itu menjadi tanggungjawab pemerintah dibawah dinas pariwisata”. (Informan 9, Kecamatan Samatiga, 14/08/2023).

Dari dua pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang sama bersama pemerintah dalam pengelolaan wisata. Masyarakat dapat menjadi partner dalam perancangan program yang adaptif dan hal-hal lain yang dapat mendukung tercapainya tujuan wisata. Namun, dalam pelaksanaannya masih terjadinya saling lempar tanggungjawab, sehingga keterlibatan masyarakat masih tergolong rendah dan pemerintah kabupaten aceh barat masih menjadi satu-satunya pelaksana atau inisiator dalam setiap program pengembangan wisata.

Analisis Convergence Model of Communications dalam penerapan Community Based Tourism

Convergence model of communication atau model konvergensi komunikasi merupakan suatu proses yang memusatkan pada informasi atau hal-hal yang disepakati bersama oleh pihak-pihak yang aktivitas berkomunikasi baik komunikator (pemberi pesan) maupun komunikan (penerima pesan) dalam rangka menghasilkan kesepakatan (konsensus). Model konvergensi ini merupakan model yang diprakarsai oleh Kincaid (1979). Pendekatan dengan model ini memungkinkan terjadinya interface antar pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun indikator yang dapat dikaji menggunakan model konvergensi komunikasi dalam konteks *community-based tourism* diantaranya, *information, uncertainty, convergence, respect, mutual agreement, collective action, network of relationship*.

a. Information

Information merupakan informasi yang disiapkan sebagai bahan dalam melakukan penyuluhan. Informasi tersebut biasanya memfokuskan pada kebutuhan dari masyarakat termasuk

memperhatikan kepada siapa informasi itu disampaikan, serta dengan menggunakan media apa sehingga pesan efektif. Dalam konteks pelaksanaan pariwisata berbasis masyarakat di Kabupaten Aceh barat pemberian informasi dilakukan secara top down, yaitu berasal dari pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah di bawah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga menjadi inisiator dalam menentukan informasi atau program pengembangan wisata. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat dipahami bahwa masyarakat masih ri menjadi objek dari sebuah informasi maupun program pengembangan wisata. Pelaksanaan diyakini terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat yang seharusnya juga menjadi partner pemerintah dalam penentuan program maupun kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam hal ini, Sebagian besar masyarakat bersifat pasif dan memposisikan diri hanya sebagai penerima pesan. Adapun media yang digunakan dalam penyampaian informasi wisata menggunakan media offline dan online. Offline dilakukan melalui kegiatan pelatihan-pelatihan penguatan potensi wisata, sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok sadar wisata (pokdarwis), dan pameran-pameran yang bertujuan untuk memperkenalkan potensi wisata yang ada di kabupaten Aceh Barat. Secara online dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, seperti youtube, Instagram, dan facebook. Berdasarkan observasi, intensitas publikasi yang dilakukan menggunakan media sosial masih tergolong minim, sehingga banyak informasi yang tidak terpublikasikan dengan maksimal.

b. Uncertainty

Uncertainty dipahami sebagai ketidakpastian terhadap hal-hal yang tidak dapat diprediksi, sehingga diperlukan pemetaan untuk menghindari atau mengurangi resiko yang mungkin akan dihadapi. Dalam hal ini, ketidakpastian berkaitan dengan persepsi pemerintah dan masyarakat yang menganggap bahwa upaya pengembangan wisata menjadi tupoksi dari pemerintah selaku subjek pelaksanaan dan memposisikan masyarakat sebagai objeknya. Hal ini menyebabkan apatisme masyarakat untuk menjadi bagian dari pengembangan wisata semakin besar, sehingga berakibat pada rendahnya keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata. Pemetaan terhadap pemecahan masalah untuk menyikap hal tersebut telah diupayakan oleh pemerintah dengan melakukan pendekatan-pendekatan dengan kelompok sadar wisata dari setiap desa yang ada di kabupaten Aceh Barat melalui pelatihan yang berfokus pada pemetaan masalah dari setiap perwakilan pokdarwis dan penyampaian solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

c. Convergence

Convergence merupakan pemusatan kepentingan. Dalam hal ini pemerintah mempertimbangkan kelompok prioritas yang menjadi fokus utama sebuah program maupun

pemberdayaan. Dalam konteks pengembangan wisata berbasis masyarakat, terdapat masyarakat yang menjadi fokus pengembangan wisata, terutama masyarakat yang berada di sekitaran destinasi wisata. Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi, pemerintah telah mengupayakan dalam mengkategorisasikan kelompok prioritas dalam program pengembangan wisata. Kelompok prioritas dipilih dengan beberapa pertimbangan dengan dua kategori, diantaranya yaitu masyarakat yang berada di destinasi yang banyak pengunjung/wisatawan, dan masyarakat yang memiliki destinasi wisata yang potensial namun belum dapat berkembang dengan baik sehingga jumlah wisatawan masih tergolong minim.

d. Respect

Respect dipahami sebagai terciptanya rasa saling mengerti, saling memahami dan saling menghargai antara pemberi pesan (pemerintah) dengan penerima pesan (masyarakat), menciptakan ikatan emosional sehingga memudahkan dalam upaya pengembangan dari setiap kegiatan. Dalam pelaksanaan pengembangan wisata, pemerintah yang saat masih menjadi subjek pelaksana program telah berupaya dalam menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat terutama masyarakat yang menjadi fokus pengembangan wisata seperti di Kecamatan Samatiga, dan Kecamatan Johan Pahlawan. Namun, masih terdapat anggapan masyarakat bahwa program yang diinisiasi oleh pemerintah tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Seperti dalam hal penyediaan sarana dan prasarana kawasan wisata, seperti mushalla, MCK, dan lain-lain yang dalam pengelolaannya masih belum maksimal sehingga sarana yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan dengan baik sebagaimana mestinya oleh wisatawan. Adanya anggapan bahwa masyarakat kerap tidak dilibatkan dalam mempengaruhi arah kebijakan pengembangan wisata juga menjadikan masyarakat untuk tidak terlibat dalam pengelolaan wisata

e. Mutual Agreement

Adanya kesamaan tujuan sehingga akan meningkatkan performa yang baik dari pemerintah dan semangat yang tinggi dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap program pengembangan yang diadakan. Mengacu pada tujuan utama pariwisata adalah meningkatkan jumlah wisatawan sehingga bermuara pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Dalam upaya pencapaian tujuan yang dimaksud pemerintah tidak bekerja sendiri, artinya pemerintah membutuhkan stakeholder baik dari dinas-dinas terkait, pelaku usaha, wisatawan maupun masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah dibawah dinas pariwisata masih dianggap sebagai satu-satunya pelaksana atau inisiator yang bertanggungjawab dalam mengembangkan pariwisata di suatu daerah. Hal ini berdampak pada semakin rendahnya keterlibatan masyarakat

untuk bersama-sama berpartisipasi dalam pengembangan wisata, sehingga tujuan wisata masih belum mampu dicapai dengan maksimal.

f. Collective Action

Collective action dipahami sebagai suatu langkah yang dilakukan secara bersama-sama dalam mengimplementasikan setiap wacana yang telah ditetapkan. Dalam konsep Community Based Tourism memposisikan bahwa masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan pariwisata, sehingga pengelolaan wisata tidak lagi bersifat *top-down* namun *bottom-up*. Namun, dalam pelaksanaan pariwisata di Aceh Barat masih bersifat *top-down*, yang inisiasi masih berasal dari pemerintah sepenuhnya. Sebagai objek pengembangan wisata melalui beberapa program, masyarakat masih belum terlibat secara bersama-sama dalam implementasi program bersama pemerintah. Hal itu mengakibatkan beberapa program pengembangan tidak dapat berjalan dengan maksimal karena rendahnya dukungan masyarakat, seperti program pengawasan kawasan pantai bebas sampah. Program tersebut dianggap tidak mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kebersihan pantai yang ada di kawasan Aceh Barat. Minimnya tanggungjawab kebersihan pantai dari masyarakat belum mampu menjadikan Kawasan pantai terbebas dari sampah baik yang dihasilkan dari lingkungan sekitar maupun sampah yang berasal dari aktivitas wisatawan saat berkunjung.

g. Network of Relationship

Network of relationship berupaya menciptakan hubungan sosial yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga akan berdampak pada keharmonisan dari proses interaksi yang berlangsung (Monge, et.al., 2003). *Community based tourism* yang memposisikan masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek namun dapat menjadi subjek dari suatu kegiatan maupun program pengembangan wisata, selayaknya dapat menjadi partner pemerintah dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Adanya kesamaan tujuan untuk secara bersama-sama mewujudkan pengembangan pariwisata masih belum dapat diimplementasikan dengan maksimal. Hal itu ditandai dari masih terjadinya *miss communication* antara pemerintah dengan masyarakat terkait kebutuhan yang semestinya yang harus dipenuhi dengan sesuatu yang didapat oleh masyarakat dari pemerintah terkadang tidak berjalan sesuai harapan. Menyikapi hal ini, pemerintah terus melakukan upaya pendekatan secara persuasif dengan masyarakat khususnya masyarakat prioritas pengembangan wisata untuk secara bersama-sama berkontribusi dalam memajukan wisata yang ada di daerah masing-masing sehingga nantinya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar yang dihasilkan dari belanja wisatawan.

Kendala dalam Penerapan Community Based Tourism di Kabupaten Aceh Barat

Community based tourism pada dasarnya memprioritaskan pada peran dan keterlibatan masyarakat dalam upaya pengembangan wisata. Implementasi konsep ini juga kerap kali dihadapkan dengan beberapa kendala yang mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan wisata di Kabupaten Aceh Barat. Adapun kendala yang ditemukan berdasarkan hasil penelitian diantaranya sebagai berikut:

a. Anggapan Pengelolaan Wisata Sepenuhnya Masih Menjadi Tanggungjawab Pemerintah

Mengacu pada aturan pemerintah Aceh yang tertuang dalam qanun Nomor 08 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan dinyatakan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas- luasnya untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Dalam rangka proses pengambilan keputusan, Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengikutsertakan masyarakat melalui penyampaian saran, pendapat, dan pertimbangan. Dalam implementasinya, sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa pengelolaan wisata menjadi tanggungjawab pemerintah sepenuhnya, sehingga keterlibatan masyarakat bukan menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Kebijakan yang tertuang dalam qanun tersebut masih belum efektif dalam pelaksanaannya, hal itu disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat terkait dengan peran yang harus dilakukan secara bersama- sama sehingga dapat mencapai tujuan pariwisata secara maksimal karena dukungan dari para stakeholder baik dari pelaku usaha, maupun masyarakat.

b. Anggapan Bahwa Praktik Wisata Dapat Mencederai Aturan Syariat Islam

Wisata dipahami sebagai suatu aktivitas yang identik dengan kebebasan tanpa ada aturan yang mengikat. Mengacu pada keistimewaan Aceh yang merupakan satu-satunya provinsi yang menerapkan syariat Islam, hal ini menjadi tantangan yang harus disesuaikan kembali oleh pelaksana maupun wisatawan ketika memilih Aceh sebagai tujuan wisata. Sebagian besar masyarakat bersikap apatis terhadap pelaksanaan wisata dikarenakan praktik wisata sewaktu- waktu dapat mencederai penerapan aturan syariat karena kurangnya pengawasan. Hal tersebut menjadikan masyarakat bersikap pasif untuk terlibat dalam setiap program pengembangan wisata. Adanya prinsip bahwa syariat Islam menjadi satu-satunya yang harus dijaga disamping kepentingan lain membuat masyarakat cenderung menolak hal-hal yang akan berpotensi melanggar aturan syariat.

c. Rendahnya kompetensi masyarakat dalam pengelolaan wisata

Ketersediaan sumber daya manusia yang dapat berperan aktif dalam pengembangan wisata menjadi hal yang sangat penting tujuan mencapai tujuan kepariwisataan. Kemampuan dan keterampilan pengelolaan tidak hanya dimiliki oleh pelaksana yang berasal dari pemerintah, namun juga masyarakat. Berdasarkan pemaparan dari beberapa informan, disampaikan bahwa sebagian besar pendidikan terakhir warga adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Literasi teknologi dan bahasa asing, pengetahuan tentang jasa pariwisata, pelayanan dan pemasaran jasa, hingga sikap mental entrepreneur pariwisata masih menjadi hal yang harus dioptimalkan. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan-pelatihan khusus kepada masyarakat terutama yang menjadi masyarakat prioritas Kawasan wisata untuk membekali pemahaman terkait dengan pengelolaan wisata berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang merupakan perwakilan dari setiap desa untuk terlibat dalam perencanaan program, menjadi bagian dari unsur pelaksana secara strukturasi, melibatkan dalam implementasi program wisata, sampai terlibat dalam pengawasan dan evaluasi program wisata yang telah dilakukan. Hal ini dimaksud untuk memberikan pengetahuan secara praktis kepada masyarakat sehingga nantinya dapat secara mandiri memberdayakan desa masing-masing yang memiliki produk wisata yang potensial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabakan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan wisata di Kabupaten Aceh Barat masih tergolong minim. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya sebagian besar masyarakat memiliki persepsi bahwa praktik wisata tidak akan memberikan efek secara langsung kepada masyarakat, termasuk dalam peningkatan ekonomi, adanya kekhawatiran bahwa pelaksanaan wisata sewaktu-waktu dapat mencederai aturan syariat dan budaya yang menjadi kearifan local masyarakat sekitar, serta kurangnya informasi yang diberikan oleh pemerintah selaku implementor pengelolaan wisata terkait program dan arah kebijakan dalam upaya pemberdayaan masyarakat kawasan wisata. Sikap apatisme masyarakat menjadikan pelaksanaan wisata berbasis *community-based tourism* di Kabupaten Aceh Barat masih belum dapat diaplikasikan secara optimal, artinya masih membutuhkan upaya strategis dan pendekatan persuasive yang harus dilakukan oleh pemerintah baik melalui informasi yang disampaikan maupun dari perancangan program yang memfokuskan

pada kebutuhan masyarakat bukan atas dasar keinginan dari pemerintah yang saat ini masih menjadi satu-satunya implementor kunci dalam pengelolaan pariwisata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi selaku penyumbang dana penelitian dengan skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) sehingga penelitian dapat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada LPPM-PMP Universitas Teuku Umar sebagai fasilitator program yang telah memberikan banyak arahan dan dukungan moril sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para informan baik dari pemerintahan, pelaku usaha, aparat desa dan masyarakat yang telah bekerjasama dengan baik dan kooperatif, sehingga memudahkan penulis mendapatkan informasi secara komprehensif dalam menjawab permasalahan yang menjadi tujuan dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adikampana, I. M. (2017). *Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Denpasar: Cakra Press.
- Alib, M. (2021). 15 tempat wisata di aceh barta terbaru & terhits dikunjungi [Internet]. 2021 [cited 2023 April 7]. Available from: <https://www.andalastourism.com/tempat-wisata-aceh-barat>.
- Asy'ari, R., Tahir, R., Rakhman, C. U., & Putra, R. R. (2021). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 8(1), 47–58gy
- Bonye, S. Z., Alfred, K. B., & Jasaw, G. S. (2012). Promoting community-based extension agents as an alternative approach to formal agricultural extension service delivery in Northern Ghana. *Asian Journal of Agric. Rural Dev*, 2(1):76–95.
- Chookaew S, Charatarawat J. (2015). Increasing halal tourism potential at andaman gulf in thailand for muslim country. *Journal of Economics Business and Management*, 3(7):156-167.
- Colin, Michael, Hal. (2000). *Tourism Planning: Policies, Processes, And Relationship*. Singapore: Prentice Hall
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Dinas Registrasi Kependudukan Aceh. (2020). Profil Perkembangan Kependudukan Aceh Tahun 2020.

- Dolezal C, Marina Novelli. (2020). Power In Community-Based Tourism : Empowerment And Partnership In Bali. *Journal of Sustainable Tourism*. 12(3):1-22.
- Edi Suharto. (2014). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial). Jakarta: PT.Refika Aditama.
- Hermawati, Prihutami Rista. (2020). Komponen Kepariwisata dan Pengembangan Community Based Tourism di Desa Wisata Nglangeran. *Jurnal Pariwisata*, 7(1):98-105.
- Istiyani, Artika Dwi. (2019). Menggali Potensi Desa Wisata Mewujudkan Masyarakat Sadar Wisata. Purbalingga: Desa Pustaka Indonesia
- Karacaoglu S, Birdir K. (2017). Success Factors Of Community Based Tourism (Cbt) Perceived By Local Peoples: The Case Of 100 Misia Project. *International Rural Tourism and Development Journal*, 10(5):53-61.
- Kincaid, L. (1979). *The Convergence Model of Communication*. Hawaii: East West Center.
- Monge, Peter R., & Contractor, Noshir S. (2003). *Theories of Communication Networks*. New York: Oxford University Press.
- Noviantoro K M, Zuhrohman A. (2020). Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism) Sebuah Tantangan Di Era Revolusi Industri 4.0. *J Equilibrium*, 8(2):112-121
- Nurmayasari, I., Viantimala, B., Gultom, D. T., Yanfika, H., & Mutolib, A. (2020). Partisipasi dan Kepuasan Petani Terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian di Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan. *Mimbar Agribisnis*, 6(1): 448–459.
- Pantiyasa, I W. (2018). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Bedulu, Blah Batuh, Gianyar). *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 2(1):113-64.
- Qanun Aceh Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata. 2023
- Suantri, P. (2003). *Community Based Tourism Handbook*. Thailand: Rest Project.
- Tolkach D, King B. (2015). Strengthening community-based tourism in a new resource-based island nation: why and how?“. *J Tourism Management*, 4(2):386-398.